

BAB III

PENGARUH KONFLIK INTERNAL PARTAI TERHADAP KINERJA PDI PERJUANGAN KABUPATEN PATI 2011 – 2012

Timbulnya konflik internal yang terjadi pada Dewan Perwakilan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Pati dalam Pemilu Tahun 2011, yaitu terkait dengan keberanian ketua DPC PDIP untuk mencabut dan mengganti nama calon pasangan yang telah di rekomendasikan oleh DPP PDIP, sehingga DPP merasa kecewa dengan ketua DPC PDIP Perjuangan, karena tidak menghiraukan surat rekomendari calon kandidat dari DPP PDIP Perjuangan, maka munculah surat keputusan SK DPP No 031/-TAP/DPP/III/2011. DPP PDIP tanpa ragu membekukan kepengurusan DPC PDIP Pati yang diketuai *Sunarwi*.

Pembekuan terhadap kepengurusan DPC PDIP Perjuangan tersebut membawa dampak bagi kinerja organisasi DPC PDIP dalam menjalankan fungsi partai politiknya. Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang diinginkan. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Dengan indikator kinerja yang telah

syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai pencapaian tujuan organisasi.

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan data- data dari hasil penelitian dan juga wawancara dengan pihak- pihak yang bersangkutan mengenai kinerja DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati setelah dibekukan, yang dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja DPC setelah pembekuan dan pelaksanaan fungsi partai politiknya.

A. Dinamika dan Kondisi Politik Pasca Pemilukada 2011

Dalam menjelang pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011, PDIP dilanda konflik internal. Konflik tersebut terjadi pada saat mengusung calon kepala daerah, ketua partai PDIP lebih mengutamakan kader – kadernya untuk dicalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga jauh hari sebelum dilangsungkan pemilukada *Sunarwi* sebagai ketua DPC dari PDIP Kabupaten Pati dan sekaligus ketua DPRD Kabupaten Pati untuk di usung sebagai calon kepala daerah Kabupaten Pati. Disini *Imam Suroso* sebagai kader dari PDIP dari DPC Kabupaten Pati yang merupakan anggota DPR RI dari PDIP juga ikut mencalonkan diri dalam Pemilukada Kabupaten Pati. Setelah melalui lobi lobi politik akhirnya DPP PDIP menyatakan bahwa DPP PDIP merekomendasikan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Pati *H Imam Suroso/Suika* sebagai bakal calon pada Pemilukada Pati. Hal ini menunjukkan

pasangan yang telah direkomendasikan oleh DPP PDIP tidak mendapat respon baik dari DPC PDIP, bahkan kepala DPC PDIP memberanikan diri untuk mencalonkan dirinya sendiri sebagai calon bupati perwakilan dari PDIP. Dan pada akhirnya KPU mengesahkan calon pasangan yang diajukan oleh DPC PDIP.

Setelah KPU menetapkan calon pasangan dari masing- masing partai, maka diselenggarakanlah pemilukada pada tanggal 23 juli 2011. Akan tetapi, pemilu yang telah diselenggarakan tersebut dinilai tidak syah karena adanya banyak permasalahan dalam proses pencalonan dan ketidakpuasan para kandidat yang laen. Dan akhirnya akan di adakan pemilukada ulang pada tahun 2012 pada tanggal 23 Juli 2011 telah berlangsung, dengan hasil terakhir perolehan suara **H.Haryanto SH.MM** yang bepasangan dengan **H.Budiyono** berhasil mengungguli pasangan lainnya dengan memperoleh 169,895 dukungan atau 28,2 %. Dari hasil pemantauan pada kantor KPUD Pati tanggal 24 Juli 2011, dengan perolehan suara masing masing peserta :

Tabel 3.1
Rekapitulasi Perolehan Suara
Pemilukada Di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah	Prosentase
1.	Hm.Slamet Warsito BE.ST.MT	99.034	16,5 %
2.	H.Sunarwi SE.MM	133.468	22.2 %
3.	Ir.H.Srimerditomo MM	98.593	16,4 %
4.	Sri Susahid SH,MH	4.320	0,7 %
5.	H.Haryanto SH.MM	169.895	28,2 %
6.	Hi.Kartina Sukawati SE,MM	96.233	16,0 %

Dengan adanya hasil diatas dapat dilihat bahwa dari masing masing calon tidak ada yang mencapai kemenangan 30 persen, dimungkinkan akan terjadi dua putaran pemilukada, untuk perolehan suara terbanyak pertama, kedua dan ketiga. Sehingga KPUD Pati menjadwalkan untuk pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua. Akan tetapi selama menunggu pemilu putaran kedua *Imam Suroso - Sujoko* menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan mengadukan pekaranya ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan termohon KPU Pati dan pasangan *Sunarwi - Tejo Pramono* pada tanggal 29 Juli 2011. Pada 17 Mei 2011, pemohon mendapat informasi Sunarwi selaku ketua dan Irianto Budi Utomo selaku sekretaris DPC PDIP Kabupaten Pati mencabut berkas pencalonan pemohon dan menggantinya dengan berkas pencalonan atas nama Sunarwi sebagai bakal calon bupati dan Tejo Pramono sebagai calon wakil bupati Pati. Dan pada tanggal 22 agustus 2011 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, akhirnya mengabulkan gugatan bakal pasangan calon Imam Suroso - Sujoko untuk seluruhnya. Dalam amar putusan rapat permusyawaratan oleh sembilan Hakim Konstitusi yang diketui Mahfud MD juga Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala

Desak dan Wakil Kepala Desa / Dusun / Kelurahan / Kecamatan / Kabupaten / Kota

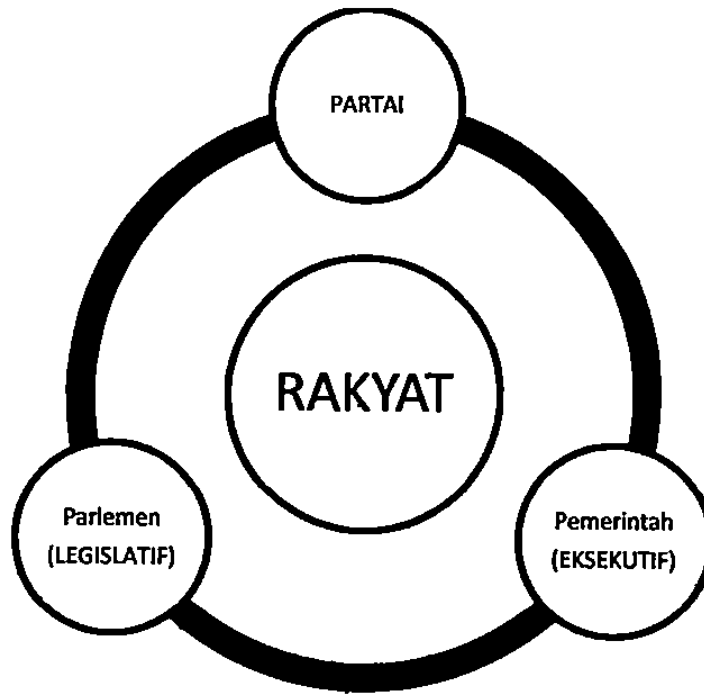
B. Kinerja DPC PDIP Kabupaten Pati

Untuk mengetahui kinerja DPC PDIP setelah terjadi konflik, maka terdapat indikator- indikator tingkat kinerja organisasi, dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tugas atau fungsi dapat dijalankan secara aktual dan misi organisasi tercapai. Adapun indikator – indikator untuk mengukur berjalannya suatu kinerja antara lain :

1. RESPONSIVITAS

Telah diketahui bahwa PDI Perjuangan merupakan partai ideologi yang berbasis massa marhen intelektual loyalis yang mengakar, berkarakter nasionalis – pancasialis. Oleh karena itu PDI Perjuangan senantiasa mendekatkankan diri kepada masyarakat khususnya di kalangan menengah kebawah untuk mengetahui keluhan kesah, kritik atau apirasi apakah yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah. PDI Perjuangan termasuk dalam kategori partai massa. Hal ini terbukti bahwa PDI Perjuangan memiliki massa yang besar dan program-program yang dirumuskan secara umum dan fleksibel. Dalam pokok- pokok langkah partai PDI Perjuangan terdapat Tiga Pilar yang berporos pada Rakyat :⁴⁸

⁴⁸ Data dari DPC Kabupaten Pati



Agenda tiga pilar PDI Perjuangan diatas harus memastikan diri dari porosnya yaitu rakyat, oleh sebab itu, harus mengetahui secara persis persoalan – persoalan yang sedang dihadapi oleh rakyat. Agar dapat mengetahui persoalan-persoalan yang telah dialami oleh rakyat, diadakan penyelidikan secara langsung, dan bukan berdasarkan informasi sekunder. Bukan hanya mengetahui persoalan rakyat, akan tetapi juga mempunyai jawaban dan menjawab pertanyaan rakyat. Oleh karena itu Tiga Pilar Partai harus mempunyai tiga agenda sebagai berikut:

2. *Pertama*, selidiki persoalan dan akar persoalan penyebab rakyat masih dalam kesulitan, kemiskinan, dan pengangguran, berapa jumlah mereka, dan bagaimana kondisi mereka

3. **Kedua**, susun rencana aksi yaitu tentang apa yang akan dilakukan oleh Tiga Pilar dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi oleh rakyat tersebut.
4. **Ketiga**, apa yang diharapkan dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan dan juga Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, dalam rangka mendukung rencana aksi yang telah disusun tersebut.

Menurut salah seorang sekretaris dari pengurus harian di DPC PDI Perjuangan yaitu Bapak Drs. Giri Dahono,⁴⁹ menyatakan bahwa partai tidak hanya bersifat normatik, tetapi berdasarkan pada kepentingan bersama dan tujuan bersama :

“...Partai politik tidak hanya bersifat normatik, tetapi kepekaan terhadap segala hal yang terjadi pada masyarakat. Nah kepekaan partai politik inilah yang nantinya mampu menciptakan revolusioner keadaan – keadaan bermasalah demi kebaikan bersama – sama dan tujuan bersama – sama. Sehingga DPI Perjuangan merupakan partai idiologi pancasila, polanya dialektika, realistic, dan revolusioner.....”

Dalam hal ini partai politik harus peka terhadap segala sesuatu yang terjadi pada masyarakat. Partai politik diharapkan mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat. Karena partai politik merupakan media penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dan pemerintah dengan masyarakat, sehingga nantinya partai politik mampu mengakomodir segala kepentingan yang berlaku di masyarakat.

⁴⁹ Wawancara dengan Sekretaris DI U PDI Perjuangan Kab Dati Des. Giri Dahono tanggal 10

Berkaitan dengan hal tersebut maka sebagai sebuah partai politik PDI Perjuangan seyogyanya dapat melaksanakan salah satu indikator kinerja yang terkait dengan komunikasi yaitu responsivitas. Responsivitas disini sebagai bentuk kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, responsivitas mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Apabila program dan kegiatan yang dijalankan dengan baik oleh organisasi publik mendapatkan respon baik dari masyarakat, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik.

Responsivitas yang di tujukan oleh DPC disini, diharapkan mampu memposisikan dirinya sebagai mediator penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga melalui DPC inilah yang nantinya dapat menampung keluhan- keluhan dan kritikan yang disampaikan oleh masyarakat yang ditujukan kepada pemerintah. Dengan idiologi partai yang berbasis massa marhen intelektual loyalis yang mengakar, berkarakter nasionalis – pancasialis, maka PDI Perjuangan senantiasa mendekatkannya diri kepada masyarakat khususnya di kalangan menengah kebawah untuk mengetahui keluh kesah, kritik atau apirasi orang-orang yang disampaikan oleh masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan salah satu anggota pengurus harian DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati yaitu Bp Drs. Giri Dahono⁵⁰ mengatakan bahwa dalam menanggapi kritik atau aspirasi dari masyarakat DCP menyediakan wadah aspirai rakyat dalam setiap PAC.

“....Jadi gini mbak di Pati ada 21 PAC yang terdapat wadah aspirasi masyarakat. Nah PAC ini terdapat di masing – masing Kecamatan, dari tiap kecamatan inilah aspirasi dari masyarakat dikumpulkan, lalu di sampaikan ke DPC, dan nantinya aspirasi masyarakat ini akan di sampaikan oleh anggota komisi PDI Perjuangan dalam rapat DPRD.....”

Dalam menanggapi aspirasi masyarakat DPC PDI Perjuangan menyediakan wadah aspirasi di setiap PAC yang berada di 21 Kecamatan antara lain yaitu PAC Pati, PAC Margorejo, PAC Tlogowungu, PAC Gembong, PAC Wedarijaksa, PAC Trangkil, PAC Juwana, PAC Batangan, PAC Jaken, PAC Jakenan, PAC Pucakwangi, PAC Winong, PAC Gabus, PAC Tambakromo, PAC Kayen, PAC Sukolilo, PAC Margoyoso, PAC Tayu, PAC Dukuhseti, PAC Cluwak, PAC Gunungwungkal dan sejak pembekuan telah terlaksana di 15 PAC di Kabupaten Pati yaitu PAC Jaken, PAC Dukuhseti, PAC Tambakromo, PAC Kayen, PAC Sukolilo, PAC Winong, PAC Tayu, PAC Gabus, PAC Pati, PAC Pucakwangi, PAC Wedarijaks, PAC Cluwak, PAC Jakenan, PAC Margorejo. Dari 21 PAC tersebut berusaha untuk dekat dengan masyarakat untuk mengetahui segala keluhan kesah yang terjadi pada masyarakat saat ini.

⁵⁰ ibid

Bukan hanya PAC saja yang bertugas untuk menanggapi aspirasi masyarakat tetapi para anggota komisi juga berusaha dekat dengan masyarakat untuk tahu bagaimana kondisi masyarakat saat ini paska Pemilu 2011. Hal ini dikuatkan dengan adanya pernyataan dari Bp H. Budiono, SH, MH⁵¹ sebagai anggota komisi I Bidang Hukum Dan Pemerintahan yang mengatakan bahwa anggota komisi disini juga ikut serta dalam menanggapi aspirasi masyarakat dengan terwujudnya program atau kegiatan yang dilakukan untuk masyarakat.

”....Sejak pembekuan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati, ada beberapa kritikan- kritikan dari rakyat mengenai konflik pemilu 2011 yang terjadi. Ada beberapa rakyat kecewa dan menyayangkan karena pemilu 2011 yang diselenggarakan pada bulan juli tahun 2011 kemarin dianggap tidak sah, dan akan diadakan pemilu ulang yang belum pasti kapan pelaksanaannya dan hal ini sangat ditakutkan oleh PDIP mbak karena kekecewaan rakyat ini nantinya akan berpengaruh terhadap kemenangan partai. Akan tetapi tidak sedikit rakyat yang tidak peduli akan adanya penyelenggaraan ulang pemilu karena adanya konflik internal partai ini...”

Ditakutkan dengan adanya konflik internal yang terjadi pada PDI Perjuangan mengakibatkan masyarakat kecewa dan “malas” dengan partai politik. Masyarakat seakan – akan tidak peduli lagi dengan penyelenggaraan pemilu ulang. Sehingga ada kemungkinan buruk yang ditakutkan oleh PDI Perjuangan apabila ada penurunan suara pada PDI Perjuangan karena adanya konflik tersebut. Oleh karena itu, saat ini DPC PDI Perjuangan senantiasa lebih mendekatkan diri kepada rakyat dengan melakukan konsolidasi dan mengadakan bakti sosial di 21 PAC yang terdapat di Kabupaten Pati. Kegiatan konsolidasi yang telah dilakukan

⁵¹ Wawancara dengan Bp H. Budiono, SH, MH⁵¹ sebagai anggota komisi I Bidang Hukum Dan

oleh DPC PDI Perjuangan ini tergolong cepat karena tercatat dari bulan September sampai dengan November sudah terjadi kegiatan bakti sosial di 15 PAC Kabupaten Pati. Dengan tujuan untuk memenangkan Pemilukada ulang nantinya.

Meskipun tidak semua masyarakat disini mempermasalahkan adanya pemilukada ulang, tidak sedikit masyarakat khususnya pendukung PDIP cenderung loyal terhadap partai. Jadi adanya pemilikuda ulang dengan nama pasangan calon yang baru diusung DPP PDIP tidak berpengaruh bagi masa pendukung PDIP, karena mereka cenderung loyal dengan partai, dan tidak terlalu peduli dengan nama pasangan calon.

Jadi dalam menanggapi kritik atau aspirasi dari masyarakat DPC PDI Perjuangan telah menyediakan wadah aspirasi di 21 PAC yang terdapat di masing – masing Kecamatan, DPC yang turun langsung kebawah di 21 PAC dalam bentuk kunjungan kerja ke PAC- PAC, serta mensosialisasikan program kerja, menyaring aspirasi, serta membangun penguatan komunikasi organisasi. Jadi, kritik dan aspirasi masyarakat dari daerah disampaikan kepada PAC, lalu PAC menyampaikan kepada DPC, dari DPC aspirasi masyarakat ini nanti akan dilaporkan oleh anggota komisi PDI Perjuangan dalam rapat di DPRD. Dari hasil rapat inilah terwujudnya suatu program dan kegiatan yang nantinya bias

2. RESPONSIBILITAS

Responsibilitas ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan kebijaksanaan organisasi yang benar yang sesuai dengan implicit atau eksplisit. Semakin kegiatan organisasi public itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan serta kebijaksanaan organisasi, maka kinerjanya akan dinilai semakin baik.

Responsibilitas dapat dinilai dari analisis terhadap dokumen dan laporan kegiatan organisasi. Penilaian dilakukan dengan mencocokkan pelaksanaan kegiatan dan program organisasi dengan prosedur administrasi dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam organisasi. Dalam aspek responsibilitas ini terkait dengan kegiatan- kegiatan dan program yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan apakah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditentukan oleh organisasi.

Saat ini kepengurusan segala program dan kegiatan DPC PDIP dipegang oleh PLH adapun susunan nama kepengurusannya yaitu :

1. H. Murdoko, SH sebagai Ketua
2. H. Bambang Bintoro, SE sebagai Wakil Ketua
3. Drs. Giri Dahono sebagai Sekretaris

5. Ir. Alwin Basri, MM sebagai Bendahara

Struktur kepengurusan Pelaksana Harian diatas merupakan anggota DPD PDIP Provinsi Jawa Tengah yang ditujuk oleh DPP PDIP untuk melaksanakan tugas pelaksana harian DPC PDIP yang sebelumnya telah dibekukan, berdasarkan surat keputusan DPP PDI Perjuangan. Secara teori partai politik telah memiliki sebuah strategi dan program yang telah diputuskan melalui kongres, agar dalam kegiatannya memiliki arah program dan kegiatan yang jelas. hal ini diperkuat dengan pernyataan Sekretaris PLH PDI Perjuangan Kab Pati, Drs. Giri Dahono yang menyatakan bahwa:⁵²

“...Dalam menjalankan program partai berpodaman pada peraturan ADART BAB II Pasal 26 dan 27 selain itu juga berpedoman dengan teori Trias Dinamika Partai yaitu tiga aktivitas kerja partai yang berurutan, bertahap dan berkelanjutan untuk mendinamisir partai.....”

Peraturan ADART pasal 26 dan 27 tersebut berisi tentang pembekuan pembubaran pengurus partai :⁵³

Pembukuan atau pembubaran kepengurusan partai dilaksanakan apabila kepengurusan tersebut melakukan hal yang merugikan atau membahayakan partai:

⁵² Wawancara dengan Sekretaris PLH PDI Perjuangan Kab Pati, Drs. Giri Dahono , tanggal 10 Januari 2012

⁵³ ADART pasal 26 dan 27 hal 97-99

1. Kepengurusan partai mengambil kebijakan yang menyimpang atau bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh jajaran partai yang lebih tinggi
2. Kepengurusan partai terpecah dalam kelompok- kelompok yang tidak dapat lagi dipertemukan dan saling bertenyangan mengenai kebijakan partai
3. Sebagian besar atau seluruh kepengurusan partai terlibat langsung dalam kegiatan menentang kepemimpinan jajaran partai satu tingkat yang lebih tinggi
4. Kepengurusan partai yang tidak dapat melaksanakan tugasnya yang telah diatur oleh ADART

Setelah DPC PDI Perjuangan dibekukan DPP DPI Perjuangan menunjuk DPD untuk mengambil alih kepengurusan sesuai dengan ADART Pasal 27 yaitu :

1. DPP Partai menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan tugas dari kepengurusan yang telah dibekukan, berdasarkan surat keputusan DPP
2. Jangka waktu tugas pelaksana harian ditentukan oleh DPP partai yang dituangkan melalui surat keputusan DPP Partai
3. Dalam hal pembekuan atau pembubaran kepengurusan Partai di tingkat pengurus anak cabang, maka tugas dan tanggung jawab kepengurusan partai tersebut ditangani oleh DPP Partai untuk melakukan koordinasi dan

pembentukan kepengurusan baru dalam jangka waktu paling lama tiga bulan

4. Dalam hal pembekuan atau pembubaran kepengurusan partai di tingkat pengurus Ranting, maka tugas dan tanggung jawab kepengurusan partai tersebut ditangani DPC Partai untuk melakukan konsolidasi dan pembentukan kepengurusan baru paling lambat tiga bulan
5. Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan pembekuan, pembubaran pengurus partai dan pembentukan pelaksana harian diatur dalam peraturan partai

Setelah DPP Partai menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan tugas dari kepengurusan yang telah dibekukan, berdasarkan surat keputusan DPP tugas PLH selanjutnya mengamankan surat rekomendasi, berusaha menata kembali partai yang dilanda konflik, dan pemenangan pemilukada periode dua. Hal ini juga didukung dengan pernyataan berdasarkan hasil wawancara dengan Bp Drs. Giri Dahono, sebagai sekretaris PLH DPC PDIP Kabupaten Pati⁵⁴, sebagai berikut:

“.....Tugas PLH itu adalah pertama menganankan rekomendasi, rekomendasi apa..?? rekomendasi disini ada tiga yaitu Pertama, menjalankan fungsi PLH yang telah dibekukan, disini PLH mentakeover segala kegiatan yang dilakukan oleh PLH yang telah dibekukan. Kedua, mengamankan surat rekomendasi pasangan calon yang telah di ajukan oleh DPP. Dan yang ketiga yaitu Pemenangan Pemilukada periode dua....”

⁵⁴ Op cit hal 75

Dalam menjalankan tugas PLH sudah mengamankan rekomendasi dari DPP PDIP. Yang dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi PLH yang telah dibekukan. Perlu ditegaskan bahwa yang dibekukan disini adalah kepengurusan, bukan partainya. Jadi partai tetap menjalankan kegiatan – kegiatan yang telah ditetapkan oleh ADART yaitu tentang integrasi kerja kader tingkat cabang dan daerah meliputi program – program kerja seperti tiga Trias Dinamika Partai, Penguatan Koordinasi Kerja Kader, dan Menampilkan Wajah Partai yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Trias Dinamika Partai

Dalam trias dinamika partai yang disusun pada saat kongres PDI Perjuangan terdapat tiga tahapan – tahapan kerja yaitu :

Pertama, Pemetaan Wilayah Politik, pemetaan wilayah politik ini merupakan dasar terpenting yang wajib dilaksanakan untuk memahami peta wilayah politik, serta memahami masalah, potensi dan realitas permasalahan yang terjadi pada rakyat setempat, agar para kader partai tidak tersesat dan salah arah dalam menyusun rencana kerja kepartaian. Pemetaan wilayah politik ini dilakukan dengan berbasis pada wilayah cabang partai, dengan wilayah pemetaan yang dibagi berdasarkan struktur pemerintahan hingga tingkat rukun tetangga. Adapun hasil yang dihasilkan dari pemetaan ini adalah untuk mengetahui kondisi

- a) Demografi tingkat desa, seperti komposisi penduduk desa atau kelurahan berdasarkan demografi yang dapat dilihat dari data petani, buruh, nelayan dan sebagainya.
- b) Perolehan suara partai pada setiap pemilu dalam masing- masing TPS
- c) Identifikasi komunitas atau kelompok masyarakat, berikut potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi oleh masing- masing kelompok.
- d) Identifikasi tokoh masyarakat (formal dan informal)
- e) Identifikasi sosiokultural (agama, kepercayaan, adat istiadat, kesenian tradisional, kesenian yang populer, dan sebagainya.
- f) Sejarah daerah, terutama sejarah politik (tentang pariwisata-pariwisata dan tokoh-tokoh penting)
- g) Dinamika dan kecenderungan sosial, politik, ekonomi dan budaya.
- h) Dan data- data yang dianggap penting dalam mensukseskan perjuangan partai.

Setelah dilaksanakan pemetaan wilayah politik, DPC PDI Perjuangan menyelenggarakan musyawarah rencana kerja partai tingkat cabang, guna untuk membahas permasalahan rakyat yang ditemukan pada saat pemetaan dengan tujuan untuk menentukan prioritas kerja dalam rangka kegiatan solusi programatik (penyelesaian permasalahan rakyat melalui program pemberdayaan) yang akan dilakukan diwilayah cabang yang bersangkutan. Dalam musyawarah rencana kerja partai tingkat cabang ini diikuti oleh tiga pilar partai yaitu:

- a) Seluruh pengurus partai tingkat cabang
- b) Ketua, sekretaris, dan bendahara tingkat cabang
- c) Kader- kader komunitas juang
- d) Seluruh kader partai yang duduk di legislatif tingkat kabupaten kota, serta kader legislatif tingkat provinsi dan tingkat pusat yang sesuai dengan daerah pemeliharannya.
- e) Kader- kader partai yang duduk di eksekutif pada kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Musyawarah rencana kerja tingkat cabang memilih prioritas kerja dengan merujuk kepada Desa Praseyta dan pokok- pokok program yang telah diputuskan oleh kongres partai. Sekaligus menentukan kriteria kader yang dibutuhkan untuk menengahi tugas- tugas tersebut. Adapun prioritas kerja yang dipilih harus mencakup tiga jenis kerja yaitu ideologis, kerja penggalangan, dan kerja pencitraan.

Kedua, Penempatan Kader. Dalam forum musyawarah rencana kerja partai tingkat cabang, dewan pemimpin cabang, partai melakukan verifikasi jumlah dan kualitas kader yang ada yang nantinya akan merujuk pada jumlah dan keahlian kader yang diperlukan untuk mengawakan program pemberdayaan yang telah diputuskan. Kader merupakan tulang punggung partai, karena kader disini bertugas untuk memastikan langkah partai kedepan sehingga menentukan jalan kemenangan dan memastikan partai melangkah dengan mantap optimis serta

dapat meminimalisir terjadinya kesalahan. Kunci dari kesemuanya tidak lain dari tiga elemen pokok partai yaitu :

- a) Struktur partai yang militant
- b) Kader partai yang ideologis,
- c) Basis massa yang sadar

Tulang punggung dari tiga elemen tersebut adalah kader partai. Hanya dengan kader partai yang berkualitas utama, maka partai akan dapat menjalankan salah satu tugas pokoknya, yakni dalam menerangi jalan rakyat, memberi petunjuk dan sekaligus memimpin perjuangan. Langkah berikutnya yaitu pembuatan keputusan dewan pemimpin cabang partai mengenai pemetaan kader komunitas juang yang bertanggung jawab untuk mengawal komunitas juang masing-masing. Seiring dengan hal tersebut, dewan pemimpin cabang partai melalui Badiklat partai menyelenggarakan pendidikan kader yang dilakukan secara berkala dilapangan komunitas juang, sebagai bagian dari pelaksanaan program sekolah partai.

Ketiga, Membumikan Kinerja Partai. Merupakan tahap untuk menerapkan ideologi menjadi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini pula, dewan pemimpin cabang partai menjalankan fungsi monitoring

terhadap para kader komunitas juang ...

Dalam membukikan kinerja partai terdapat tiga jenis kerja yang dilakukan yaitu :

a) Kerja partai yang bersifat idiologis, Kerja idiologis adalah kegiatan untuk memilih dan melaksanakan prioritas program pemberdayaan rakyat dengan mengacu pada desa prasetya yaitu :

- 1) Dipimpin oleh partai, dilaksanakan oleh kader komunitas juang dengan memberdayakan posisi politik kader yang duduk di eksekutif dan legislative sebagai perpanjangan tangan partai
- 2) Bekerja berdasarkan program kerja partai yang dirumuskan dalam musyawarah rencana kerja DPC dari hasil pemetaan politik yang dilakukan oleh kader komunitas juang.
- 3) Kader- kader yang ditugaskan dalam komunitas juang berfungsi sebagai pertanggungjawaban kesuksesan program dalam komunitas juang masing- masing

b) Kerja partai yang bersifat penggalangan

Kerja penggalangan merupakan kegiatan pengorganisasian kekuatan rakyat yang berdasarkan komunitas juang (kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok buruh, kelompok terpinggirkan, kelompok pemuda dan kelompok profesi) yang dilakukan dalam rangka menjalankan program pemberdayaan sesuai dengan perumusan yang telah dilakukan

dari hasil pemetaan dengan melibatkan 1

ada. Kegiatannya ini dilakukan secara terus menerus sebagai bagian dari proses kaderisasi.

c) Kerja partai yang bersifat pencitraan

Program kerja kepartaian yang bersifat pencitraan dilakukan untuk menyebarluaskan hasil-hasil kerja dan perjuangan partai yang positif (success story) kepada rakyat yang biasanya dipublikasikan melalui surat kabar atau majalah, televisi dan radio, kerjasama dengan media massa cetak dan elektronik, serta sarana lain yang memungkinkan. Selain itu program kerja kepartaian yang bersifat pencitraan ditunjukkan dengan cara memperluas basis dukungan rakyat kepada partai.

1) Penguatan Koordinasi Kerja Kader Partai

Penguatan koordinasi kerja kader partai melalui pelebagaan Musyawarah Rencana Kerja Cabang Musrenja Daerah, dan Musrenja Pusat Partai

2) Menampilkan Wajah Partai melalui :

- a. Infiltrasi, kooptasi, dan kerjasama dengan media masa
- b. Mendirikan media massa partai (radio, tv, dsb)
- c. Membangun sistem informasi partai (antara lain jaringan di dunia masyarakat)

d. Konferensi pers dan siaran pers secara berkala

- e. Study meeting dengan para intelektual dan tokoh masyarakat, sebagai kegiatan wajib dan PraKongres, PraKonferda, dan PraKonfercab, yang disiarkan secara meluas melalui media massa
- f. Dialog terbuka secara berkala dengan kelompok- kelompok masyarakat kalangan intelektual, yang diliput atau disiarkan secara luas oleh medi massa, cetak, maupun elektronik

Selain menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan teori diatas, tugas PLH selanjutnya yaitu mengamankan surat rekomendasi calon pasangan yang telah diusung DPP PDIP. Seperti yang dikatan oleh Bp. Drs Giri Dahono selaku sekertaris PLH DPC PDIP Pati mengatakan bahwa :⁵⁵

“....Jadi dalam mengamankan surat rekomendasi calon pasangan yang telah ditetapkan oleh DPP PDIP, PLH harus mengamankan berkas - berkas nama calon pasangan sebelumnya yaitu Sunarwi - Tejo Pramono saya anulir dan mengganti dengan melengkapi berkas - berkas calon pasangan Imam Suroso - Sujoko yang merupakan calon pasangan yang di rekomendasikan oleh DPP dan PLH sudah mengamankan surat rekomendasi calon dari DPP PDIP....”

Peda Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2011 kemarin DPC PDIP telah mendaftaran nama calon pasangan Sunarwi – Sutejo. Pasangan calon Sunarwi – Tejo Pramono, sedangkan DPP PDIP mencalonkan Imam Suroso – Sujoko untuk maju dalam Pemilukada. Setelah proses perdebatan secara panjang dan dengan berbagai pertimbangan KPU memutuskan untuk pasangan dari PDIP yang syah yaitu calon pasangan Sunarwi – Tejo Pramono. Calon pasangan yang diusung

PDIP Iman Suroso – Sujoko mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Imam Suroso. Dari kasus tersebutlah kepengurusan DPC PDIP dibekukan dan dialihkan kepengurusannya kepada PLH dari DPD PDIP yang ditunjuk oleh DPP.

Jadi tugas yang disebut sebagai mengamankan surat rekomendari nama pasangan calon yaitu mengamankan nama pasangan calon pada pemilukada periode pertamana yaitu tahun 2011 kemarin yaitu Sunarwi – Tejo Pramono, lalu diganti dengan melengkapi sarat administratif nama pasangan calon Imam Suroso – Sujoko.

Setelah mengamankan surat rekomendasi kepengurusan atau pelaksanaan tugas yang diambil alih oleh PLH dan telah mengamankan surat rekomendasi nama pasangan calon. Tugas PLH selanjutnya yaitu berusaha menata kembali keanggotaan partai dan memenangkan pemilukada periode kedua. Seperti yang dikatan oleh Bp. Drs. Giri Dahono sebagai sekretaris PLH DPC PDIP Kabupaten Pati bahwa :⁵⁶

“.....Dalam menjalankan tugas sebagai PLH pertama, saya harus mengamankan rekomendasi tentang diri saya sendiri sebagai pelaksana harian, saya harus berjalan tegak lurus, saya tidak takut dalam menjalankan rekomensasi tersebut, ibarat ada kereta yo tak tabrak, tembok besarpun yo tak tabrak. Saya sebagai PLH tidak takut karena ini perintah DPP. Saya sudah menjalankan tugas yang pertama, tugas yang kedua yaitu pemenangan pemilukada disini tidak hanya PLH, tetapi KPU ikut serta karena secara keseluruhan KPU yang menjadwalkan kembali pelaksanaan pemilukada periode kedua. Untuk menjadwalkan pemilukada ualang harus menjalankan resekedul

⁵⁶ Ibid

kan, lha dalam melaksanakan resekedul tersebut harus ada persetujuan anggaran dari "BANGGAR". Kalau belum di setujuhi KPU tidak dapat menjadwalkan pemilukada ulang mbak...."

Dari hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa PLH DPC PDIP telah melakukan tugas – tugasnya antara lain pertama, mengambil alih kepengurusan PLH yang telah dibekukan. Kedua, mengamankan surat rekomendasi nama pasangan calon Iman Suroso – Sujoko. Dan yang ketiga yang belum seluruhnya terlaksanakan yaitu dalam memenangkan Pemilukada Kabupaten Pati Periode Kedua Tahun 2012.

3. AKUNTABILITAS

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengembangkan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu dengan diberikan kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dalam melaksanakan mandat tersebut perlu adanya suatu akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas yang baik, memadahi, tertib, dan teratur sudah menjadi tuntutan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan pertanggungjawabannya atas

kegiatan yang telah dilaksanakan. Sistem pengawasan perlu diterapkan dan hasil audit harus dipublikasikan, dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi. Oleh karena itu diharapkan setiap instansi – instansi pemerintah saling bantu membantu pemimpin tertinggi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan mandat atau kewenangan kepada masyarakat publik melalui lembaga perwakilan.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilities managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing - masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Seperti halnya dengan laporan pertanggungjawaban keuangan organisasi Partai Politik, sebagai suatu entitas yang menggunakan dana publik yang besar, harus transparan sehingga pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-undang Partai Politik dan UU Pemilu, seluruh sumber daya keuangan yang digunakan

Bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan partai politik serta pemilu adalah penyampaian Laporan Dana Kampanye (semua peserta pemilu) serta Laporan Keuangan (khusus untuk Partai Politik), yang harus diaudit Akuntan Publik, ke KPU serta terbuka untuk diakses publik. Hal ini dilakukan selain menekan potensi kecurangan dalam penggalangan dana, standardisasi laporan keuangan partai politik juga bisa dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan pilihan secara cerdas dan rasional.

Selama ini hambatan utama dalam mendorong akuntabilitas dalam partai politik adalah pada penciptaan tertib keuangan. Parpol tidak memiliki standar pencatatan, pelaporan, dan audit sehingga laporan tahunan parpol ke KPU kian tahun kian buruk, baik dari jumlah laporan maupun kualitasnya. Selain itu hambatan dalam membangun akuntabilitas partai politik adalah tidak adanya regulasi yang mengharuskan adanya standar aset dan laporan keuangan partai politik. Serta tidak adanya sanksi kepada partai politik jika ternyata terjadi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan partai politik atau dana kampanye.

Terkait aspek akuntabilitas yang ditunjukkan oleh DPC PDI Perjuangan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bp H. Budiono, SH, MH yaitu anggota

komisi I bidang hukum dan tata usaha DPR RI

“....Ada keterbukaan atau transparansi laporan pertanggung jawaban dari program- program yang telah dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan selama ini, laporan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan dilaporkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Linmas) Kabupaten Pati...”

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilaporkan oleh masing - masing komisi sebagai bentuk pertanggung jawaban atas terlaksanakannya tugas atau kegiatan yang telah dilaksanakan di masyarakat. Laporan ini diserahkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Linmas) Kabupaten Pati, karena sebagian anggaran keuangan pada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pati diperoleh dari Kesbang Linmas tersebut.

Tidak semua anggaran keuangan diperoleh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Linmas) Kabupaten Pati, tetapi dalam menjalankan operasional partai juga memperoleh dana sukarela seperti yang diungkapkan oleh Bp H. Budiono, SH, MH yaitu anggota komisi 1 bidang hukum dan pemerintahan dari fraksi PDI Perjuangan mengatakan bahwa:⁵⁸

“.....Dana operasional juga diperoleh dari iuran wajib anggota fraksi, iuran wajib kader, iuran anggota berupa iuran wajib dan iuran sukarela, dan sumbangan – sumbangan dari simpatisan partai....”

Jadi dapat disimpulkan bahwa selama ini DPC PDIP dalam melaksanakan program dan kegiatannya telah dilaporkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Linmas) Kabupaten Pati. Karena Kesbang Linmas inilah yang sebagian memberikan dana untuk operasional partai.

dana yang diperoleh dari iuran wajib anggota fraksi, iuran wajib kader, iuran anggota berupa iuran wajib dan iuran sukarela, dan sumbangan – sumbangan dari simpatisan partai.

4. PRODUKTIVITAS

Produktivitas dimaksudkan tidak hanya untuk mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan sehingga diharapkan memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting dengan kualitas layanan yang terbaik, maka akan tercipta kepuasan masyarakat yang diberikan pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output.

Seperti yang dikemukakan oleh Sedarmayanti dalam bukunya *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*, bahwa produktivitas memiliki dua dimensi produktivitas kinerja yakni efektivitas dan efisiensi. Dimensi pertama berkaitan dengan pencapaian untuk kinerja yang maksimal, dalam arti pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Sedangkan dimensi kedua berkaitan dengan upaya membandingkan masukan dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan⁵⁹.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diartikan bahwa untuk mengukur suatu produktivitas diperlukan dua dimensi yaitu efektivitas dan dimensi efisiensi,

⁵⁹ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*, 2000, 58

yang keduanya saling berkaitan satu sama lain dalam pencapaian target yang berkaitan, berupa kualitas yang maksimal. Berbicara tentang efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi pada keluaran, sedangkan masalah masukan kurang menjadi perhatian khusus atau utama. Oleh karena itu keterkaitannya dengan produktivitas kerja tingkat keefektifan aparatur atau pegawai sangat penting untuk menghasilkan suatu *output*. Lain halnya dengan efektivitas, keterkaitan efisiensi dengan produktivitas lebih berorientasi terhadap suatu ukuran dalam membandingkan penggunaan masukan (*input*) yang direncanakan dengan penggunaan masukan yang sebenarnya terlaksana. Singkatnya pengertian efisiensi disini lebih berorientasi pada masukan, sedangkan masalah keluaran (*output*) kurang menjadi perhatian utama.

Dalam pelaksanaan kegiatan PLH telah melakukan banyak kegiatan untuk masyarakat. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Bp Drs. Giri Dahono, selaku sekretaris PLH PDI Perjuangan yang mengatakan bahwa :⁶⁰

“...Setelah pembekuan seluruh kegiatan yang melakukan adalah PLH atas dasar perintah partai, jadi sekarang yang melakukan kegiatan ada pada saya. Selama ini kegiatan yang dilakukan banyak sekali dan saya tidak bias menyebutkan satu – persatu mbak karena jumlahnya ratusan. Kan seluruh kegiatan partai kan termasuk kegiatan fraksi, karena fraksi merupakan kempanjangan dari partai..”

Berdasarkan tingkat produktifitas PLH telah melakukan beberapa success

bulan September setelah pembekuan sampai bulan Desember 2011, DPC telah melakukan 60 kegiatan baik itu konsolidasi ke masing – masing PAC yang terdapat di Kabupaten Pati, Bakti Sosial, Pertemuan dan Sosialisasi Korcam + Kordes di masing- masing Kecamatan, Pengajian Akbar dan lain- lain.

Dalam melaksanakan kegiatan konsolidasi setelah pembekuan DPC telah melaksanakan kunjungan ke beberapa kecamatan di Kabupaten Pati antara lain di Kecamatan Jaken yaitu di rumah Bp Priyo pada hari Selasa 27 September 2011 jam 11.00 WIB, di Kecamatan Jakenan yaitu di rumah Bp Didik pada hari Selasa, 27 Sep 2011 Jam 13.00 WIB, Kecamatan Winong Dapil III yaitu di Kantor PAC Kec. Winong pada hari Selasa, 27 Sep 2011 Jam 16.00 WIB, Kecamatan .Pucakwangi Dapil III Kab. Pati di Gedung KPRI (Kec. Pucakwangi) pada hari Selasa, 27 Sep 2011 Jam 19.00 WIB, Konsolidasi PAC PDIP + Ranting Dapil I Kec. Pati di ISC pada hari Rabu, 30 Sep 2011 Jam 10.00 WIB, Konsolidasi PAC PDIP + Ranting Dapil I Kec. Margorejo di rumah Ibu Siti Asiyah pada hari Rabu, 30 Sep 2011 Jam 13.00 WIB, Pertemuan dan Sosialisasi Korcam + Kordes Kec. Margoyoso di KUD Margoyoso pada hari Jumat 14 Oktober 2011 dan masih banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh DPC PDIP Kabupaten Pati setelah dibekukan.⁶¹

Dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPC PDIP setelah dibekukan diatas dapat disimpulkan bahwa DPC PDI Perjuangan masih tetap melaksanakan kegiatan- kegiatannya seperti konsolidasi, sosialisasi maupun

⁶¹ Data dari anggota komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan

kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan di masing – masing Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pati. Walaupun kepengurusan atau struktur organisasi saat ini masih belum terbentuk dan masih di pegang oleh pelaksana harian, namun DPC PDI Perjuangan berusaha melaksanakan kegiatan- kegiatan guna untuk pencapaian kemenangan dalam Pemilu pada 2012 nanti.

5. PROFESIONALITAS

Mengukur jumlah atau tingkat sumberdaya pegawai yang melaksanakan tugas-tugas suatu organisasi yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Tujuannya adalah menciptakan suatu organisasi yang secara efektif memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini perlu didukung dengan mekanisme dalam penerimaan anggota organisasi. Apabila anggota organisasi dapat berkerja secara profesional maka keberhasilan organisasi tersebut semakin tinggi. Indikator – indikator yang dapat digunakan untuk mengukur profesionalitas kerja anggota organisasi menurut Hall 1968 dalam *“Tesis Pengaruh Profesionalisme Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Internal Auditor, Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening”* antara lain yaitu :⁶²

- a. Afiliasi Komunitas (*community affiliation*) yaitu menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sumber ide utama pekerjaan.

Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesi.

- b. Kebutuhan untuk mandiri (*Autonomy demand*) merupakan suatu pandangan bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (Pemerintah, klien, mereka yang bukan anggota profesi). Setiap adanya campur tangan (intervensi) yang datang dari luar, dianggap sebagai hambatan terhadap kemandirian secara profesional. Banyak yang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak-hak istimewa untuk membuat keputusan dan bekerja tanpa diawasi secara ketat. Rasa kemandirian dapat berasal dari kebebasan melakukan apa yang terbaik menurut karyawan yang bersangkutan dalam situasi khusus. Dalam pekerjaan yang terstruktur dan dikendalikan oleh manajemen secara ketat, akan sulit menciptakan tugas yang menimbulkan rasa kemandirian dalam tugas
- c. Keyakinan terhadap peraturan sendiri/profesi (*belief self regulation*) dimaksud bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan "orang luar" yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
- d. Dedikasi pada profesi (*dedication*) dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan keahliannya yang

dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik berkurang. Sikap ini merupakan ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani dan setelah itu baru materi.

- e. Kewajiban sosial (*social obligation*) merupakan pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kinerja anggota dalam suatu organisasi itu sangat dipengaruhi oleh profesionalisme dan motivasi kerja yang merupakan kemampuan individu untuk menggunakan usaha yang tinggi dalam upaya mencapai tujuan-tujuan organisasi, sehingga anggota yang telah melaksanakan tugas secara profesional tersebut akan mendapatkan reward. Berdasarkan wawancara dengan sekretaris pelaksana harian Bp Drs. Giri Dahono Profesionalitas dalam anggota DPC PDI Perjuangan dapat dilihat dari:

- a. Kedisiplinan anggota
- b. Dapat membedakan antara hak dan kewajiban
- c. Totalitas dalam mengerjakan pekerjaan
- d. Menyelesaikan tugas secara tepat waktu yang telah ditentukan
- e. Dapat membedakan antara kepentingan organisasi dengan

Salah satu pentahapan rekrutmen dalam kepengurusan PDI Perjuangan pertama kali yaitu diangkat menjadi anggota partai, dengan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah menikah.
- b. Menyetujui dan menaati Piagam Perjuangan Mukadimah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Partai.
- c. Bersedia menaati dan menegakkan Disiplin Partai
- d. Calon anggota harus menyatakan kesediaannya untuk menjadi anggota secara tertulis dan memenuhi persyaratan yang disampaikan kepada pengurus Partai yang berwenang.

Setelah memenuhi syarat diatas maka seluruh calon anggota harus melalui masa pembinaan, selanjutnya calon anggota yang sudah memenuhi persyaratan, sebelum dilantik menjadi anggota wajib mengucapkan sumpah janji sebagai anggota partai yang diatur dalam Peraturan Partai. Pengesahan seseorang menjadi anggota Partai diputuskan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai, dan penerimaan atau penolakan anggota Partai diputuskan dalam Rapat Dewan Pimpinan Cabang Partai.

Dalam pengrekrutan anggota DPC PDI Perjuangan sangat mengutamakan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya dalam hal tingkat pendidikan. Seperti penutamakan terhadap orang-orang yang mempunyai pendidikan minimal siana

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bp Drs. Giri Dahono yang mengatakan bahwa :

“.....tingkat pendidikan dalam organisasi itu sangat penting karena, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap kualitas berfikirnya. Selain itu, untuk menjadi ssebuah partai politik yang modern Sumber Daya Manusia ini sangat berpengaruh...”

Jadi dari wawancara dari narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penerimaan anggota tinggkat pendidikan dan sumber daya manusia sangat berpengaruh, semakin orang mempunyai pendidikan yang tinggi maka akan berpengaruh juga terhadap pola berpikirmya.

C. Pelakasanaan Fungsi Partai Politik DPC PDIP Kabupaten Pati

Dalam sistem demokrasi partai politik mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Dalam pelaksanaan kinerja terkait dengan aspek responsivitas yang ditujukan oleh PLH DPC PDIP, dengan adanya wadah aspirasi masyarakat untuk menampung dan menanggapi kritik dan saran dari masyarakat. Responsivitas ini merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam menjalankan fungsi partai politik, karena responsivitas ini merupakan salah satu faktor pendukung dalam menjalankan fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik.

Yang dimaksud partai politik sebagai sarana komunikasi politik disini adalah merupakan Proses menghubungkan pendapat orang lain ini disebut dengan "penggabungan kepentingan" (interest aggregation). Setelah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dengan bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan "pengumpulan kepentingan" (interest articulation). Dengan adanya partai politik ini dapat dijadikan wadah untuk memperbincangkan dan menyebarkan rencana- rencana dan kebijakan- kebijakan pemerintah. Dengan demikian arus informasi serta dialog dari atas kebawah dan dari bawah ke atas, yang dimana partai politik memainkan peranan sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini dikuatkan dengan adanya pernyataan dari Bp Drs. Giri Dahono yang mengatakan bahwa : ⁶³

"....fungsi partai politik terhadap rakyat dapat ditunjukkan dari memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa aman..."

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa partai politik sadar apa yang akan dibutuhkan oleh masyarakat. Dan sadar bahwa masyarakat merupakan hal yang paling penting dalam partai politik. Oleh karena itu partai politik berusaha mendekati diri kepada masyarakat, dan berusaha mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

Untuk mengetahui apa yang menjadi keluhan kesah yang sedang dihadapi

oleh masyarakat partai politik

masing – masing 21 PAC di Kecamatan Pati. Hal ini dikuatkan dengan adanya pernyataan dari Bp. Drs. Giri Dahono sebagai berikut :⁶⁴

“....dalam melaksanakan fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik, partai membentuk kader – kader yang berkualitas dan tidak bersifat arogan...”

Partai sangat selektif dalam penyeleksian calon kader- kader. Karena kader disini merupakan hal penting yang dibentuk oleh partai untuk menampung laporan - laporan dari masyarakat yang biasanya disampaikan pada saat rapat PAC diseluruh di Kabupaten Pati.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik, dapat ditunjukkan dari adanya pelaksanaan kinerja responsivitas yang ditunjukkan oleh PLH DPC Kabupaten Pati.

2. Partai Politik Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Dalam pelaksanaan kinerja terkait dengan responsibilitas yang dapat dinilai dari analisis terhadap dokumen dan laporan kegiatan organisasi. Penilaian dilakukan dengan mencocokkan pelaksanaan kegiatan dan program organisasi dengan prosedur administrasi dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam organisasi. Dalam aspek responsibilitas ini terkait dengan kegiatan- kegiatan dan program yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan, apakah sesuai dengan visi dan misi

Dalam pelaksanaan kinerja PLH DCP PDIP Kabupaten Pati dapat ditunjukkan dengan kesediaan DPD PDIP Jateng dalam menjalankan surat rekomendasi dari DPP PDIP untuk mengambil alih segala kegiatan yang dilaksanakan oleh PLH DPC PDIP yang telah dibekukan. Setelah menjalankan rekomnedasi PLH telah mengankan surat rekomendasi pasangan calon yang telah diusung oleh DPP yaitu calon pasangan Iman Suroso – Sujoko. Dan sekang tugas PLH yaitu berusaha memperbaiki kondisi partai politik yang pada pemiilukada tahun 2011 menuai konflik baik internal maupun eksternal, dan menyusun strategi kemenangan pada pemilukada ulang yang diselenggarakan tahun 2012.

Pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh PLH yang sesuai dengan insteruksi dari DPP PDIP merupakan bukti bahwa PLH mampu melaksanakan fungsi partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Yang dimaksud dengan pelaksanaan fungsi partai politik sebagai sarana pengatur konflik adalah:⁶⁵

“Apabila dalam sebuah organisasi tidak bisa dihindari bahwa perbedaan pendapat juga pandangan seringkali menimbulkan konflik, oleh karena itu disini partai politik sebagai salah satu sarana pengatur konflik harus biasa menjadi mediator atau penengah dalam hal menyelesaikan permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat maupun dilingkungan pemerintah”

Dari pernyataan mengenai fungsi partai politik sebagai sarana pengatur konflik diatas dapat dijadikan tolak ukur dalam analisis kinerja PLH DPC PDIP terkait dengan aspek responsibilitas yang telah dibuktikan dengan ketersediaan

PLH PDIP dalam menjalankan perintah dari DPP yaitu menjalankan rekomendasi, mengamankan surat rekomendasi calon pasangan yang diusung DPP PDIP, berusaha menyelesaikan konflik yang terjadi pada PDIP dan melakukan strategi pemenangan dalam pemilu pada ulang yang akan diselenggarakan pada tahun 2012.

3. Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Profesionalitas disini dapat dilihat dari jumlah atau tingkat sumberdaya pegawai yang melaksanakan tugas-tugas suatu organisasi yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Dengan tujuannya untuk menciptakan suatu organisasi yang secara efektif memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaan kinerja PLH DPC PDIP terkait dengan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia para anggota atau kader – kader partai politik. Hal ini dikuatkan dengan adanya pernyataan dari Bp. Drs. Giri Dahono selaku sekretaris PLH DPC Kabupaten Pati yang mengatakan bahwa :⁶⁶

”.... tingkat pendidikan dalam organisasi itu sangat penting karena, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap kualitas berfikirnya. Selain itu, untuk menjadi sebuah partai politik yang modern Sumber Daya Manusia ini sangat berpengaruh...”

⁶⁶ Op cit hal 75

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa sumber daya manusia (SDM) sangat berpengaruh dalam penyeleksian calon kader partai karena, semakin seseorang tersebut mempunyai pendidikan yang tinggi maka akan berpengaruh juga terhadap pola berpikirnya.

Pelaksanaan kinerja PLH DPC PDIP yang terkait dengan aspek professional ini yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia, dapat dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Dalam pelaksanaan fungsi partai politik sebagai rekrutmen politik yaitu dengan proses dimana masyarakat mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan. Dimana partai politik tersebut mencari dan mengajak orang berbakat untuk aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political Recruitment). Hal ini dikuatkan dengan pernyataan dari Bp. Giri Dahono sebagai sekretaris PLH DPC PDIP yang mengatakan bahwa : ⁶⁷

“....dalam melaksanakan fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik, partai membentuk kader – kader yang yang berkualitas dan tidak bersifat arogan...”

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik , sangat dipengaruhi oleh kinerja PLH DPC PDIP Kabupaten Pati dalam menjaring kader – kader partai yang sangat mempertimbangkan sumber daya manusia. Karena partai politik akan pentingnya

keintelektualan dalam berfikir anggota sangat mempengaruhi dalam mewujudkan
suatu partai yang modern dan berideologi Pancasila